

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teoritis	23
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Pengertian Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	34
1. Pengaturan Perseroan Terbatas.....	34
2. Pengertian Perseroan Terbatas.....	35
3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan hukum.....	36
4. Klasifikasi Perseroan Terbatas.....	40
B. Pendirian Perseroan Terbatas	45
C. Modal Perseroan Terbatas	52
1. Struktur Modal Perseroan	52
2. Bukti Penempatan dan Penyetoran Modal	57
3. Penyetoran Atas Modal Saham Dalam Bentuk Lain	59
D. Organ Perseroan Terbatas	61
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	61
2. Dewan Komisaris	64
3. Direksi	67
E. Tinjauan Tentang Akta Notaris	70
F. Hubungan Notaris dengan Para Pihak Penghadap	74
G. Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas	78
H. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	79
1. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas	80
2. Pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris.....	82
3. Pengesahan dan Persetujuan	83
4. Daftar Perseroan Terbatas	86
5. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	87
I. Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online)	90

J. Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui AHU Online	92
K. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	96
L. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	98
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	101
2. Tata Cara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	103
3. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar	105
4. Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar	106
M. Peran Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	108

BAB III IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TERHADAP AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS	112
A. Implikasi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Perseroan Terbatas.....	112
B. Pengaruh Terhadap Perseroan Terbatas yang Terlambat Menyetorkan Modal Setelah Jangka Waktu 60 (enam puluh) Hari Sebagaimana Diwajibkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016	124
C. Akibat Hukum Terhadap Putusan RUPS Tentang Perubahan Anggaran Dasar yang Permohonan Persetujuan atau Pemberituannya Melewati Batas Waktu	129
D. Solusi Bagi Perseroan Terbatas yang Belum Melaporkan Bukti Slip Setor Modal dan Terkena Sanksi Pemblokiran Pada Sistem Administrasi Badan Hukum.....	133
E. Solusi Bagi Perseroan Terbatas yang Belum Melaporkan Bukti Slip Setor Modal dan Terkena Sanksi Pemblokiran Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online).....	134
BAB IV PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146